

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS  
KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PASURUAN**

**SKRIPSI**



Oleh

**Anisa Fitri Sulistyaningrum**

**NIM D42191916**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER  
2023**

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PASURUAN**

**SKRIPSI**



sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr.)  
di Program Studi Akuntansi Sektor Publik  
Jurusan Manajemen Agribisnis

Oleh

**Anisa Fitri Sulistyaningrum**

**NIM D42191916**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS  
POLITEKNIK NEGERI JEMBER  
2023**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PASURUAN**

**Anisa Fitri Sulistyaningrum  
NIM D42191916**

Telah diuji pada tanggal 15 Maret 2023  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

**Ketua Penguji**



Endro Sugiartono, SE, MM  
NIP. 19700827 200003 1 002

**Sekretaris Penguji**



Dessy Putri Andini, SE, MM  
NIP. 19821219 200604 2 001

**Anggota Penguji**



Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun.  
NIK. 19920219201805 1 001

**Dosen Pembimbing**



Dessy Putri Andini, SE, MM  
NIP. 19821219 200604 2 001

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Manajemen & Bisnis**



Taufik Hidayat, S.H., M.Si  
NIP. 197409022005011001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Fitri Sulistyaningrum

Nim : D42191916

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam skripsi saya yang berjudul “ Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan” merupakan gagasan dan hasil karya sendiri dengan arahan pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang dikutip dari karya penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Jember, 15 Maret 2023

Anisa Fitri Sulistyaningrum  
D42191916



**PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Anisa Fitri Sulistyaningrum  
NIM : D42191916  
Program Studi : Akuntansi Sektor Publik  
Jurusan : Manajemen Agribisnis

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas Karya Ilmiah berupa **Laporan Skripsi yang berjudul:**

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PASURUAN**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk Pangkalan Data (*Database*), mendistribusikan karya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Politeknik Negeri Jember, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jember  
Pada Tanggal : 15 Maret 2023  
Yang menyatakan,



Nama : Anisa Fitri Sulistyaningrum  
NIM : D42191916

## **MOTTO**

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-QS. Al-Insyirah : 6-

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

-Bobby Unser-

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr.). Selama proses penyelesaian laporan ini, penyusun mendapat banyak bimbingan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dessy Putri Andini, SE, MM selaku ibu kedua penyusun.

Akhir kata yang dapat disampaikan, semoga segala kebaikan yang dilimpahkan dapat dibalas berkali lipat oleh Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Penyusun menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan, maka dari itu diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

Jember, 15 Maret 2023

Anisa Fitri Sulistyaningrum

**Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan** Dessy Putri Andini, SE,MM

**Anisa Fitri Sulistyaningrum**  
Program Studi Akuntansi Sektor Publik  
Jurusan Manajemen Agribisnis

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai ASN di Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kota Pasuruan yaitu sebanyak 33 perangkat daerah sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari 23 perangkat daerah yang berstatus dinas dan badan daerah. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 23. Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pasuruan.

**Kata Kunci** : Penganggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

***The Influence of Implementation of Performance-Based Budgeting on  
Performance Accountability in Pasuruan City Government Agencies***

Dessy Putri Andini, SE,MM

**Anisa Fitri Sulistyaningrum**

*Study Program Public Sector Accounting  
Majoring of Agribusiness Management*

***ABSTRACT***

*This study aims to explain and analyze the influence of the Implementation of Performance-Based Budgeting on Performance Accountability in Pasuruan City Government Agencies. This research uses quantitative methods. The data source in this study is primary data obtained from the results of distributing questionnaires to respondents. The population in this study were all ASN employees in the Regional Apparatuses (PD) within the scope of the Pasuruan City Government, namely as many as 33 regional apparatuses, while the sample in this study used purposive sampling consisting of 23 regional apparatuses with regional service and agency status. The statistical tool used to test the hypothesis is simple linear regression with the help of the SPSS 23 application. The results of the analysis show that performance-based budgeting has a significant effect on accountability for the performance of government agencies in Pasuruan City.*

***Keywords:*** *Performance-Based Budgeting, Performance Accountability of Government Agencies*

## RINGKASAN

**Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan**, Anisa Fitri Sulistyaningrum, NIM D42191916, Tahun 2023, Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember, Dessy Putri Andini, SE,MM (Dosen Pembimbing).

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. Tujuan dari pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja yaitu untuk dapat merepresentasikan kepentingan dan harapan masyarakat terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didefinisikan sebagai komitmen instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara berkala.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil mendistribusikan kuisioner kepada responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah Kota Pasuruan.

## **PRAKATA**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penyusun diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak). Dengan selesainya skripsi ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Saiful Anwar, S.TP, MP selaku Direktur Politeknik Negeri Jember.
2. Taufik Hidayat, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Agribisnis.
3. Ibu Dessy Putri Andini, SE, MM selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember
4. Bapak Endro Sugiartono, SE, MM selaku Ketua Penguji.
5. Ibu Dessy Putri Andini, SE, MM selaku sekretaris penguji sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberi arahan selama penyusunan skripsi berlangsung.
6. Bapak Sugeng Hartanto, S.E., M.Akun selaku Anggota Penguji.
7. Kedua orang tua dan teman-teman di Bangil dan Jember.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun.

Jember, 15 Maret 2023

Anisa Fitri Sulistyaningrum

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Landasan Teori .....</b>	<b>7</b>
2.2.1 Teori Agensi .....	7
2.2.2 Penganggaran Berbasis Kinerja.....	9
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	9
2.2.4 Perangkat Daerah .....	10
<b>2.3 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>12</b>
<b>2.4 Pengembangan Hipotesis .....</b>	<b>12</b>

2.4.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja .....	12
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1 Rancangan Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>3.2 Populasi dan Sampel.....</b>	<b>14</b>
3.2.1 Populasi Penelitian .....	14
3.2.2 Sampel Penelitian .....	14
<b>3.3 Variabel Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>3.4 Definisi Operasional Variabel.....</b>	<b>16</b>
<b>3.5 Instrumen Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>3.6 Lokasi Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>3.7 Prosedur Pengumpulan Data.....</b>	<b>17</b>
<b>3.8 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>17</b>
3.8.1 Uji Asumsi Klasik .....	17
3.8.2 Analisis Regresi Linier Sederhana .....	18
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	18
3.8.4 Uji Parsial (Uji t) .....	19
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>20</b>
4.1.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian .....	22
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>27</b>
<b>5. 1 Kesimpulan.....</b>	<b>27</b>
<b>5. 2 Saran .....</b>	<b>27</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>31</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	5
Tabel 2. 2 Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota .....	11
Tabel 3. 1 Daftar Perangkat Daerah Kota Pasuruan .....	15
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	16
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian .....	20
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden .....	21
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas .....	22
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	22
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana .....	23
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	24
Tabel 4. 7 Hasil Uji t.....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	12
---------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian dari Bangkesbangpol .....	31
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Program Studi.....	33
Lampiran 3 Kuisisioner .....	35
Lampiran 4 Jawaban Responden.....	40
Lampiran 5 Hasil Output SPSS.....	43

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena perkembangan sektor publik dapat diamati dengan semakin menguatnya tuntutan atas pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat (Renyowijoyo, 2013). Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pertanggungjawabannya kepada publik.

Setiap instansi pemerintah yang telah diberikan mandat harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah diembannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat dan dirasakan baik yang menghasilkan kegagalan maupun keberhasilan. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya berkenaan dengan laporan kepatuhan dan kewajiban pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku, tetapi juga berkaitan dengan kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang dapat menjawab pokok permasalahan mengenai apa yang harus dipertanggungjawabkan. Penerapan konsep akuntabilitas telah dijalankan pada seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan konsep akuntabilitas pada setiap lini pemerintahan akan menyebabkan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan Negara.

Munculnya tiga paket Undang-Undang memberikan dampak perubahan dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan terjadinya reformasi dalam manajemen keuangan. Tiga paket Undang-Undang tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Tiga paket Undang-Undang tersebut mendorong pemerintah mengelola keuangannya menjadi lebih baik dan membuat laporan pertanggungjawaban yang

disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporannya.

Salah satu bentuk reformasi yaitu adanya pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pentingnya akuntabilitas oleh instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah dialokasikan. Masyarakat sebagai pihak yang mendelegasikan pekerjaan kepada pemerintah daerah berhak untuk memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dasar akuntabilitas kinerja termuat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada laporan kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah keharusan yang perlu dilakukan dalam membagikan pertanggungjawaban yang menerangkan kinerja sekaligus aktivitas dari pegawai, pimpinan atau lembaga kepada divisi yang berhak atau berkewajiban untuk membawa informasi dan keterangan terkait sukses tidaknya pengamalan program kegiatan yang disusun (Abdullah, 2017).

Dalam mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang baik, pemerintah Kota Pasuruan dituntut untuk selalu melakukan perbaikan dalam kinerjanya. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja oleh pemerintah Kota Pasuruan diharapkan anggaran yang disusun dapat diwujudkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Keberhasilan kinerja instansi pemerintah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara pengalokasian APBD yang baik. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap pengalokasian dan APBD maka harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi

terhadap laporan APBD. Dari data yang didapatkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah Kota Pasuruan tahun 2021 presentase realisasi anggaran mencapai 81,86 % dimana hal tersebut dikategorikan sebagai capaian yang cukup baik tetapi belum mencapai indikator baik ataupun sangat baik. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah masih belum merealisasikan anggarannya dengan baik. Presentase didapatkan melalui perbandingan alokasi anggaran pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp 1.048.788.636.231,00 dan realisasi belanja sebesar Rp 858.584.017.159,52.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang digunakan adalah: Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah Kota Pasuruan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah Kota Pasuruan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan terkait pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah Kota Pasuruan.

### **2. Bagi Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar rujukan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki capaian kinerjanya.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terkait penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai indikator dalam menganalisis suatu penelitian dan digunakan sebagai landasan dalam memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	(Marliyana et al., 2021)  Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)	transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap Instansi Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat.	- Objek penelitian
2.	(Sari et al., 2021)  Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan)	Anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	- Objek penelitian - Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh
3.	(Nur Desiana Wardani & Silvia, 2021)  Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Lembaga Penjaminan	- secara simultan kinerja berbasis anggaran dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah . - Secara parsial masing-masing variabel berpengaruh positif	- Objek penelitian - Variabel independen pada penelitian ini menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran - Teknik pengambilan sampel pada

	Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung	signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	penelitian ini menggunakan sampel jenuh
4.	(Anggraeni & Saleh, 2020)  Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)	penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah daerah Kota Bandung.	- Objek penelitian
5.	(Selviani, 2020)  Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi	Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.	- Objek penelitian
6.	(Priatna & Nuraisyah, 2018)  Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah desa se Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut	- Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja - Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.	- Objek penelitian - Variabel independen pada penelitian ini menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran
7.	(Syuliswati & Asdani, 2017)  Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang	- Secara simultan faktor perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja; dan - Secara parsial faktor perencanaan dan pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, namun	- Objek penelitian - Pada penelitian ini anggaran berbasis kinerja dibagi menjadi 4 sub variabel - Teknik analisis datanya menggunakan regresi berganda - Teknik pengambilan

		pelaksanaan dan evaluasi anggaran tidak signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, akan tetapi semua variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.	sampel pada penelitian ini menggunakan sampel jenuh
8.	(Wibisono & Riharjo, 2016)  Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- secara parsial dan simultan perencanaan, implementasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.	- Objek penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas. Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yang diantaranya : (1) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja; (2) Variabel akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen; dan (3) teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Agensi

Teori keagenan mengemukakan bahwa jika terdapat pembagian fungsi pengelolaan dan kepemilikan pada perusahaan maka akan memunculkan konflik keagenan Jensen & Meckling (1976). Teori agensi melibatkan hubungan perjanjian antara *principal* dan *agent*. Teori agensi menjelaskan terkait hubungan keagenan dimana pihak *principal* menyerahkan mandat kepada *agent* untuk menjalankan tugas. Model keagenan disusun dengan mengikutsertakan pihak manajemen dan pemilik. Selanjutnya, terjadi kesepakatan/kontrak kerja antara manajemen dan pemilik untuk memperoleh manfaat yang diharapkan. Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Bergman & Lane (1990) mengungkapkan

bahwa negara demokrasi modern didasarkan atas hubungan *principal* dan *agent*. Kerangka hubungan *principal* dan *agent* merupakan suatu pendekatan yang bermakna dalam menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik.

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik (Renyowijoyo, 2013). Dalam lingkup organisasi sektor publik, hal ini sejalan dengan Mardiasmo (2009), memaparkan bahwa pemerintah merupakan pemegang mandat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala tindakan yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk masyarakat selaku pihak pemberi mandat yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Pemaparan oleh Mardiasmo terkait akuntabilitas dalam lingkup sektor publik mendefinisikan bahwa dalam pengelolaan instansi pemerintah terdapat hubungan keagenan ( teori agensi) antara masyarakat sebagai *principal* dan instansi pemerintah sebagai *agent*.

Informasi yang lebih banyak diterima oleh pemerintah selaku pihak yang memberikan pelayanan publik dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah hanya mengutamakan kepentingan pemerintah dan tidak peduli terhadap kemakmuran rakyatnya. Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya asimetri informasi dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh *agent*. Sebagai konsekuensinya, instansi pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya agar dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai *agent* harus menerapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (*principal*). Pihak *principal* tentu mengharapkan hasil kinerja yang baik dari *agent*. Kinerja tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik. Laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja digunakan sebagai indikator dan pertanggungjawaban kinerja

instansi pemerintah. Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja ini maka kinerja dari instansi pemerintah akan lebih jelas dan terukur hasil atau manfaatnya, karena anggaran berbasis kinerja menuntut kesesuaian dan kejelasan tujuan dan sasaran yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah baik dari segi ketercapaian sasaran kinerja maupun keuangan. Penerapan *agency theory* sejalan dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pasuruan yaitu dimana instansi pemerintah diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat.

### 2.2.2 Penganggaran Berbasis Kinerja

Menurut Abdul Halim (2017) menyatakan bahwa penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk untuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggung jawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Sedangkan menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. Sedangkan berdasarkan Anggarini & Puranta (2010) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai sistem penganggaran yang fokus utamanya lebih kepada pemanfaatan dana yang ada supaya dapat dipergunakan dengan optimal dan sesuai dengan apa yang direncanakan.

### 2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan konsep pertanggungjawaban atas tindakan individual atau organisasi yang telah diamanatkan. Mengacu pada teori agensi (*agency theory*) akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto et al., 2007). Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut perlu diatur prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP agar LAKIP yang disusun tersebut berkualitas, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder* pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah keharusan yang perlu dilakukan dalam membagikan pertanggungjawaban yang menerangkan kinerja sekaligus aktivitas dari pegawai, pimpinan atau lembaga kepada divisi yang berhak atau berkewajiban untuk membawa informasi dan keterangan terkait sukses tidaknya pengamalan program kegiatan yang disusun (Abdullah, 2017). Konsep akuntabilitas dalam arti luas juga memberikan pengertian bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta *stakeholder* lain.

#### 2.2.4 Perangkat Daerah

Diperlukan pembagian tugas yang efektif dan efisien agar visi dan misi daerah dapat tercapai dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Perwujudan tersebut dilakukan oleh daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perangkat Daerah yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat daerah merupakan satu kesatuan dalam lingkup pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu bupati/ wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan. Berikut merupakan penjabaran Perangkat Daerah dalam lingkup daerah Kabupaten/Kota :

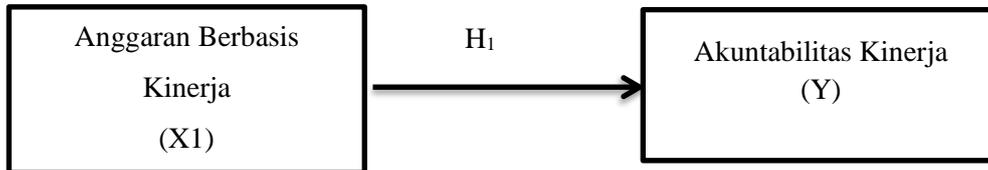
Tabel 2. 2 Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Kedudukan</b>
Sekretariat Daerah	Unsur staf
Sekretariat DPRD	Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota
Inspektorat	Unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah
Dinas	Unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
Badan	Unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
Kecamatan	Dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

*Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*

### 2.3 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini kerangka konseptual yang digunakan yaitu sebagai berikut:



Keterangan:

→ = Secara parsial      Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah bertindak sebagai *agent* yang menerapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (*Principal*). Suatu kinerja yang baik dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang diberikan. Laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja digunakan sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari segi ketercapaian sasaran kinerja maupun keuangan.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah (Abdullah, 2017). Sedangkan menurut Anggraeni & Saleh (2020) anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang secara khusus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan Priatna & Nuraisyah (2018), Wibisono & Riharjo (2016) dan Sari et al (2021) mengungkapkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Metode kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang memiliki dasar filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti akan menguji pengaruh variabel independen yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai bagian keuangan serta Perangkat Daerah Kota Pasuruan yang berstatus dinas dan badan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji regresi linier sederhana dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 23 dalam mengolah data penelitian.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

#### **3.2.1 Populasi Penelitian**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Kurniawan & Zahra Puspitaningtyas (2016) menuturkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang diteliti, akan tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai ASN di Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintahan Kota Pasuruan yaitu sebanyak 33 PD.

#### **3.2.2 Sampel Penelitian**

Sampel merupakan bagian dari populasi. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel (*sample statistics*) yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya (*population parameters*) (Kurniawan &

Zahra Puspitaningtyas, 2016). Pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu :

1. Pegawai bagian keuangan
2. Perangkat Daerah (PD) yang berstatus dinas daerah dan badan daerah

Adapun alasan pemilihan pegawai bagian keuangan sebagai responden adalah karena pegawai tersebut terlibat langsung dalam penyusunan anggaran sedangkan kriteria dinas daerah dan badan daerah dipilih karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa dinas daerah dan badan daerah merupakan unsur pelaksana dan unsur penunjang dalam melaksanakan urusan pemerintahan dengan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Tabel 3. 1 Daftar Perangkat Daerah Kota Pasuruan

No	Perangkat Daerah (PD)	Responden	
		Rencana	Realisasi
1.	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian, dan Pengembangan Daerah	2	
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2	
3.	Badan Kepegawaian Daerah	2	
4.	Badan Pendapatan Daerah	2	
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	
6.	Dinas Kesehatan	2	
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	
8.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	
9.	Dinas Sosial	2	
10.	Dinas Tenaga Kerja	2	
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2	
12.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Petamanan	2	
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	
14.	Dinas Perhubungan	2	
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2	
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	
17.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2	
18.	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu	2	
19.	Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga	2	
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	
21.	Dinas Perikanan	2	
22.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	

23. Satuan Polisi Pamong Praja	2
TOTAL	46

(sumber : Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016)

### 3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan penyelidikan terhadap variabel independen ( variabel yang mempengaruhi) dan identifikasi peristiwa atau fakta sebagai variabel dependen ( variabel yang dipengaruhi). Variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas kinerja sedangkan variabel independen yang digunakan adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini merupakan penyusunan anggaran yang sesuai dengan program atau kegiatan yang telah direncanakan pada Perangkat Daerah Kota Pasuruan.	1. Visi dan misi 2. Rencana strategis 3. Kesesuaian anggaran (Bastian, 2010)
3.	Akuntabilitas Kinerja (Y)	Akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini merupakan kewajiban dalam melaksanakan pertanggungjawaban terkait kinerja dan segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang berhak memperoleh pertanggungjawaban atas berhasil tidaknya suatu program kegiatan pemerintah.	1. Pertanggungja waban atas sukses tidaknya pelaksanaan program kegiatan serta pencapaian indikator kinerja pada Perangkat Daerah Kota pasuruan (Abdullah, 2017)

### 3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Kurniawan & Zahra Puspitaningtyas (2016), instrument penelitian adalah suatu indikator yang digunakan dalam riset, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena (variabel) yang diamati. Pada riset ini instrument penelitian yang digunakan berupa kuisisioner yang ditunjukkan kepada responden yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan kuisisioner yang berasal dari penelitian (Nur

Desiana Wardani & Silvia, 2021) yang terdiri dari penerapan anggaran berbasis kinerja (X1) dan akuntabilitas kinerja (Y). Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala *likert* yang digunakan pada penelitian ini adalah *checklist*. Adapun skala *likert* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) = 4
2. Setuju (S) = 3
3. Tidak Setuju (TS) = 2
4. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

### **3.6 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 23 Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Pasuruan. PD tersebut terdiri dari 19 Dinas dan 4 Badan Daerah di wilayah Kota Pasuruan.

### **3.7 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

#### **3.8.1 Uji Asumsi Klasik**

##### **a. Uji Normalitas**

Sebelum melakukan uji hipotesis tahap awal yang dilakukan yaitu melakukan uji normalitas, data yang digunakan dalam penelitian wajib terdistribusi secara normal (Sujarweni & Utami, 2019). Uji normalitas bermaksud menilai apakah data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak. Analisis *Kolmogorof Smirnov* digunakan dalam melakukan uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas didapat dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (*Sig.*) > 0,05 maka data berdistribusi normal.

2. Jika nilai signifikansi (*Sig.*) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Perbedaan varian residual yang terjadi dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain dapat diketahui dengan melakukan uji heterokedastisitas (Sujarweni & Utami, 2019). Uji *Glejser* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (*Sig.*) > 0,05 maka tidak terdapat adanya heterokedastisitas
2. Jika nilai signifikansi (*Sig.*) < 0,05 maka terdapat adanya heterokedastisitas

### 3.8.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana untuk pengujian hipotesis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Dimana :

Y = Variabel dependen ( akuntabilitas kinerja)

$\alpha$  = Konstanta regresi

$\beta$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Variabel independen ( penerapan anggaran berbasis kinerja)

e = *Error*

### 3.8.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0-1. Nilai  $R^2$  yang bernilai kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

#### 3.8.4 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016) uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan signifikansi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi (*Sig.*)  $\leq 0,05$  maka H0 ditolak.
2. Jika nilai signifikansi (*Sig.*)  $\geq 0,05$  maka H0 diterima.

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Visi Misi Pemerintah Kota Pasuruan

Visi Pemerintah Kota Pasuruan: Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota yang maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya (Madinah).

Misi Pemerintah Kota Pasuruan:

1. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan
2. Membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan
3. Memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang Tangguh serta jaminan akses Pendidikan dan Kesehatan yang merata
4. Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif

Data penelitian ini didapatkan dari menyebarkan kuisioner pada bulan Mei - Agustus tahun 2022 kepada 23 Perangkat Daerah yang berstatus dinas dan badan daerah sebanyak 51 kuisioner yang terdiri dari pegawai bagian Keuangan. Dari 51 kuisioner yang telah disebarkan terdapat 51 kuisioner yang kembali. Berikut tabel pencapaian target pengumpulan data penelitian:

Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian

No	Perangkat Daerah (OPD)	Responden		
		Rencana	Realisasi	Data yang terkumpul
1.	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian, dan Pengembangan Daerah	2	2	2
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2	3	3
3.	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2
4.	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	3	3
6.	Dinas Kesehatan	2	2	2

7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2	2
8.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	3	3
9.	Dinas Sosial	2	2	2
10.	Dinas Tenaga Kerja	2	2	2
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2	3	3
12.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Petamanan	2	3	3
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2
14.	Dinas Perhubungan	2	2	2
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2	2	2
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	2	2
17.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2	2	2
18.	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu	2	2	2
19.	Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga	2	2	2
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2	2
21.	Dinas Perikanan	2	2	2
22.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	2	2
23.	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

*Sumber : Pengolahan Hasil Kuisisioner Penelitian, 2022*

Beberapa karakteristik yang digunakan dalam memenuhi deskripsi responden yang didasarkan pada karakteristik responden berdasarkan jabatan.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Bendahara	19
Ka. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan	21
Ka. Subbagian Keuangan	4
Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	3
Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	4
Total	51

*Sumber : Pengolahan Hasil Kuisisioner Penelitian, 2022*

#### 4.1.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian

##### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

###### a. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas data untuk item-item variabel anggaran berbasis kinerja (X) dan variabel akuntabilitas kinerja (Y) dengan menggunakan metode *One Sample Kolmogrov-Smirnov* dengan asumsi suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi  $> 0,05$ .

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp.sig</i>	Taraf Signifikansi	Keterangan
0,069	0,05	Berdistribusi Normal

Sumber: Lampiran 5. Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan table 4.3 didapatkan nilai sebesar  $0,069 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

###### b. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas menggunakan *Uji Glejser* dengan ketentuan apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terdapat adanya heterokedastisitas.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Anggaran berbasis kinerja (X)	0,213	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Lampiran 5. Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji heterokedastisitas menggunakan *uji glejser* didapatkan nilai sebesar 0,213 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

##### 2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Pada uji regresi linier sederhana ini dapat menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu anggaran berbasis kinerja (X)

sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi
Konstan	6,878
Anggaran Berbasis Kinerja	0,833

*Sumber: Lampiran 5. Hasil Penelitian*

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, pengujian regresi linier sederhana yang menggunakan IBM SPSS 23 menghasilkan persamaan  $Y = 6,878 + 0,833 X + e$ . Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Konstanta

Nilai konstanta sebesar 6,878 mengandung arti bahwa jika variabel anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen (X) dianggap konstan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 6,878.

b. Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan hasil tabel diatas menyatakan bahwa nilai koefisien anggaran berbasis kinerja yaitu sebesar 0,833. Hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan nilai variabel anggaran berbasis kinerja akan meningkatkan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,833, sehingga variabel anggaran berbasis kinerja memiliki hubungan yang linier dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada hasil output pengolahan IBM SPSS 23 pada tabel Model Summary. Hasil nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai  $R^2$  kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variabel-variabel dependen sangat terbatas begitupun sebaliknya. Berikut merupakan hasil dari uji Koefisien Determinasi:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
0,919	0,844	0,841

Sumber: Lampiran 5. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,844 yang menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel anggaran berbasis kinerja (X) sebesar 84,4% sedangkan sisanya 15,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

#### 4. Uji Parsial ( Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh variabel dependen dan independent dengan penggunaan signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara signifikan begitupun sebaliknya. Berikut merupakan hasil dari uji t:

Tabel 4. 7 Hasil Uji t

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Anggaran berbasis kinerja (X)	0,000	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Lampiran 5. Hasil Penelitian

Berdasarkan table 4.7 didapatkan nilai sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja (X) berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

## 4. 2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada pemerintah daerah Kota Pasuruan

Hipotesis penelitian menyebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan yang fokus utamanya yaitu memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. Dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang dikelola dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2010).

Dikaitkan dengan penelitian penerapan anggaran berbasis kinerja pada akuntabilitas kinerja pada lingkup pemerintah Kota Pasuruan dinilai cukup baik. Hal ini dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Kota Pasuruan presentase realisasi anggaran sebesar 81,86% yang tergolong cukup baik. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang ditetapkan telah sesuai dengan visi misi dan rencana strategik pada Perangkat Daerah Kota Pasuruan. Jika dikaitkan dengan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah Kota Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dimana Perangkat Daerah Kota Pasuruan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan pelaporannya. laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah disajikan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Hal ini sejalan dengan teori *agency* maka pemerintah sebagai *agent* berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai *principal*. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa instansi menjalankan anggaran berbasis kinerja sebagai alat pertanggungjawabannya kepada publik. Dan apabila anggaran berbasis

kinerja dilaksanakan dengan baik, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan baik pula. Maka dalam hal ini anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anggraeni (2020) dan Priatna (2018) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada pemerintah daerah Kota Pasuruan yang didukung dengan pembahasan terkait Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, diperoleh hasil bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pasuruan yang artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Pasuruan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan yang sama, disarankan agar meneliti subjek yang lain, dengan variable-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dan juga dapat mengambil sampel yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Kinerja* (Edisi Revi, Vol. 8, Issue 2). Salemba Empat.
- Anggarini, Y., & Puranta, B. H. (2010). *Anggaran berbasis kinerja: penyusunan APBD secara komprehensif*. UPP STIM YKPN.
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung ). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36–44.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: suatu pengantar*. Erlangga.
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). *Public Policy in a Principal-Agent Framework. Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25*.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *Akutansi Sektor Publik*. Perpustakaan Nasional.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics* 3, 305–360.
- Kurniawan, A. W., & Zahra Puspitaningtyas. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cetakan Pe). Pandiva Buku.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Marliyana, N., Ishak, J. F., & Hastuti. (2021). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) *Indonesian Accounting*

*Research Journal*, 1(3), 544–550.

Nur Desiana Wardani, & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47–56.

Pemerintah RI. (2003). *Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.

Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*.

Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Pemerintah RI. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*.

Pemerintah RI. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Priatna, H., & Nuraisyah, E. (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Desa se-Kecamatan Cisewu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(11), 57–80.

Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik ; Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media.

Sari, M. S., Suhendar, & Nofitri, R. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( studi pada Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan ). *Jurnal of*

*Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 3(1), 1–9.

Selviani, D. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *Logistic and Accounting Development*, 1(1), 108–219.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA.

Sujarweni, W., & Utami, L. R. (2019). *The Master Book of SPSS : Pintar mengolah data statistik untuk segala keperluan secara otodidak*. Start Up.

Syuliswati, A., & Asdani, A. (2017). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang. *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM )*, 24(1), 1–17.

Wibisono, S., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(9), 1–22.